

## Pemprov DKI Gelar Konsultasi Publik RUU Kekhususan Jakarta

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Iman Satria tak setuju dengan kebijakan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi siswa yang kedapatan melakukan tawuran atau merokok, yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Iman Satria mengingatkan adanya konsekuensi dari kebijakan tersebut, khususnya kepada warga kurang mampu yang ingin agar anaknya bisa mengenyam bangku pendidikan.

"Kalau memang konsisten kayak begitu ya akan menaui konsekuensi," kata Iman Satria, Selasa (9/5).

Iman mengatakan dengan dicabutnya KJP tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi warga kurang mampu yang ingin agar anaknya bisa mengenyam bangku pendidikan. Untuk itu, Iman Satria berharap lebih mengedepankan upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan guru dan orang tua.

Politisi partai Gerindra itu menilai dari segi pengawasan di sekolah, guru, dan seluruh jajaran sekolah dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengawasi siswa di sekolah.

"Ya pembinaan secara kerohanian lah, ditanya sebab-sebabnya kenapa. Ada konseling di sekolah supaya mereka tahu permasalahannya," kata dia.

Adapun pengawasan di lingkungan rumah menjadi tanggung jawab orang tua, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan. Salah satunya dengan mengerahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk

melakukan pengawasan di wilayah rawan tawuran.

Pemprov DKI juga diharapkan dapat membangun lebih banyak Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai tempat interaksi yang layak untuk tempat bermain anak. Iman menilai dengan adanya RPTRA yang dilengkapi fasilitas bermain, para orang tua bisa mengawasi anak-anaknya dengan mudah dan aman.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan akan menindak tegas pelajar DKI Jakarta yang kedapatan merokok. Salah satunya dengan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi pelajar perokok.

Hal itu ditegaskan Heru saat memberi sambutan pada Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) ketiga Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) DKI Jakarta Masa Bakti XXII Tahun 2023 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (5/5).

"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan, kalau murid yang mendapatkan KJP Plus itu kedapatan merokok, KJP-nya wajib dicabut. Supaya kita berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda terbatas," kata Heru.

Sekadar informasi, untuk KJP Plus, besaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp 250 ribu, SMP/MTs Rp 300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp 420 ribu. Sementara bagi siswa SMK sebesar Rp 450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp300 ribu. Adapun total penerima KJP Plus bersasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pada awal Maret 2023 ialah sebanyak 803.121 siswa, berasal dari sekolah negeri dan swasta.

● **yan**

## Korban 'Staycation Bareng Bos' Masih Trauma, Belum Kerja Lagi

BEKASI (IM) - Karyawan berinisial AD, korban 'tidur bareng bos' atau 'staycation bareng bos' demi kontrak kerja diperpanjang, dimintai klarifikasi oleh polisi hari ini. AD mengaku belum kembali bekerja lantaran masih mengalami trauma.

"Belum kerja lagi. Masih trauma, takut," kata AD di sela proses klarifikasi di Mapolres Metro Bekasi, Cikarang, Selasa (9/5).

Kuasa hukum korban, Untung Nasari, mengatakan proses klarifikasi terhadap AD masih berlangsung. Menurutnya, klarifikasi yang dijalankan AD masih sekitar 20 persen. "Nanti jam 13.00 WIB berlanjut. Ini masih sekitar 20 persen lah ya. 80 persen lagi masih perlu proses untuk BAP," kata Untung di lokasi.

Untung mengatakan AD baru dimintai keterangan awal mengenai rekrutmen dan posisi pekerjaan. Dia menyebutkan proses klarifikasi belum membahas pokok perkara. "Tadi masih sekitar tentang rekrutmen, tentang posisi pekerjaan. Dan belum masuk pada pokok perkara," ujarnya.

Lebih lanjut Untung mengaku pihaknya membawa barang bukti baru dalam proses klarifikasi ini. Namun dia enggan memerinci barang bukti baru tersebut.

"Barang bukti baru ada

ya nanti. Pasti terkait dengan pokok perkaranya," kata Untung.

### Tanggapan Pemkab Bekasi

Sementara itu Pemkab Bekasi tidak tinggal diam. Mereka akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. "Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Kamis (4/5) lalu.

Apabila info tersebut benar, jelas Dani, perbuatan tersebut telah melanggar aturan, baik dari aspek norma sosial, moral, maupun hukum. "Saya kira kalau memang ada praktik seperti itu, tentunya sudah melanggar norma moral, hukum, dan etika," imbuhnya.

"Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani.

Selama ini, pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat. Pemkab Bekasi akan berkoordinasi bersama Disnakertrans Pemprov Jabar untuk menelusuri masalah yang tengah heboh diperbincangkan di media sosial tersebut. ● **yan**

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT



### PROGRES PEMBANGUNAN MRT JAKARTA

Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP201 di Kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (9/5). Menurut data PT MRT Jakarta (Persero) per tanggal 25 April 2023, progres pembangunan fase 2A MRT Jakarta untuk CP 202 (Stasiun Harmoni-Sawah Besar-Mangga Besar) telah mencapai 12,34 persen sedangkan untuk CP 203 (Stasiun Glodok dan Kota) telah mencapai 32,43 persen dengan cakupan pekerjaan meliputi proteksi dan relokasi utilitas, pekerjaan kanal decking, pembongkaran JPO lama, pembongkaran halte lama Harmoni, dan pekerjaan tes pit Transjakarta pile Harmoni.

## PEMBEBASAN LAHAN NORMALISASI CILIWUNG MACET

# Pj Gubernur Heru Minta Lurah Percepat Surat Keterangan Warga

Heru Budi mengatakan penyelesaian administrasi untuk pembebasan lahan perlu segera dilakukan untuk kebaikan warga di sana. Heru merasa kasihan dengan nasib warga di bantaran Kali Ciliwung. Sebab, kawasan itu mudah banjir saat hujan mengguyur bahkan ketinggian air bisa mencapai dua meter.

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan memanggil Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin soal pembebasan lahan proyek normalisasi Ciliwung yang belum tuntas. Heru akan mengevaluasi pembebasan tanah yang mandek di Rawajati, Jaksel.

"Ciliwung, nanti kan saya panggil Wali Kota Jaksel," kata Heru Budi di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/5).

Heru Budi mengatakan ada beberapa hal yang perlu dibahas perihal kelanjutan proyek Normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Jakarta Selatan.

"Ada beberapa hal yang memang harus dipercepat, administrasi saya minta lurah-lurah mempercepat, memback-up kalau warga ingin meminta surat keterangan hilang. Nanti Wali Kota saya panggil untuk itu," ujarnya.

Heru Budi mengatakan penyelesaian administrasi untuk pembebasan lahan perlu segera dilakukan untuk kebaikan warga di sana. "Yang penting untuk mempercepat, untuk masyarakat dibantu supaya administrasi itu sudah berada di BPN, kan semuanya punya hak BPN," katanya.

Hal tersebut perlu dipercepat karena Heru merasa kasihan dengan nasib warga di bantaran Kali Ciliwung. Sebab, kawasan itu mudah

banjir saat hujan mengguyur bahkan ketinggian air bisa mencapai dua meter.

"Kasihan kan warga di situ, katanya dua jam hujan banjir, kasihan," ucapnya.

Sebelumnya, Heru Budi memaparkan sejumlah kendala dalam merampungkan proyek normalisasi Ciliwung di Jakarta Selatan, khususnya di Kelurahan Rawajati. Kendala itu di antaranya adalah surat tanah warga yang hilang.

"Memang ada beberapa poin yang masih terdapat kendala, yang pertama surat tanah warga hilang," kata Heru Budi usai meninjau perkembangan proyek normalisasi Kali Ciliwung di lokasi, Senin sore (8/5).

Kini surat tanah warga yang hilang tengah diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Namun warga Rawajati itu tetap diminta untuk melapor

ke polisi untuk memudahkan proses pembebasan lahan.

"Hal ini sedang diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Asalkan ada surat keterangan hilang dari Kepolisian, mudah-mudahan bisa diproses secepatnya," ujarnya.

Menurut Kepala Sekretaris Kepresidenan itu, ada 12 surat pengakuan hak (SPH) tanah milik warga setempat untuk lahan belum bersertifikat yang hilang. Sebab, dalam meningkatkan kualitas hak milik tanah bagi seseorang, SPH tanah diperlukan sebelum disahkan menjadi sertifikat tanah yang resmi. Kendala pembebasan tanah yang ditemukan di Rawajati adalah luas lahan yang tercantum di surat keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sama dengan kenyataan di lapangan. Tanah yang ada lebih luas daripada yang tertera di surat PBB. ● **yan**

## Legislator Minta Pj Gubernur Heru Perhatikan Rencana Penghapusan 417 Bus Transjakarta

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, S Andyka mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberi atensi terhadap rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang mengusulkan penghapusan aset 417 unit bus Transjakarta. Hingga kini, dewan belum memberi persetujuan usul tersebut.

"Kita berharap agar Pemprov dalam hal ini Penjabat Gubernur DKI Jakarta (Heru Budi Hartono) memberi perhatian cukup atau bahkan lebih, terkait persoalan 417 bus ini," tutur Andyka saat ditemui dalam rapat Komisi C DPRD DKI di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/5).

Andyka menjelaskan, pihaknya memang merencanakan untuk melakukan survei ke lapangan memeriksa ratusan bus yang bakal dilonggorkan. Namun, hingga saat ini, dewan masih terkendala belum mendapatkan data dari Badan Pengelolaan

Aset Daerah (BPAD) DKI untuk mengkomparasikan fakta aset bus dan di lokasi yang akan disurvei.

"Sampai saat ini karena kita kemarin terkendala Ramadhan kemudian masuk ke Idul Fitri jadi hingga saat ini kita belum tindaklanjuti hasil rapat kemarin yang mana kita akan mengadakan kunjungan kerja langsung ke lapangan melihat kondisi 417 bus yang dimaksud," tutur politikus Partai Gerindra tersebut.

Meski begitu, Andyka menyebut, dewan sudah membuat satu program sembari menunggu data 417 bus Transjakarta itu diberikan oleh BPAD DKI. Dia mengaku, tidak ingin ketika aset bus tersebut dihapus, nantinya muncul masalah hukum di kemudian hari.

"Tentunya ini juga sambil menunggu data-data eksisting seperti rapat-rapat sebelumnya yang kita minta bahwa kapan bus masuk Jakarta, kapan mulai digunakan, kapan

berhenti digunakan, jadi jangan sampai pada saat proses masuknya kemarin ada yang beberapa bermasalah kemudian pada saat proses penghapusan aset menimbulkan masalah juga," ujar Andyka.

Dia pun menekankan perlunya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono agar dapat menindaklanjuti rencana tersebut. Tujuannya agar Pemprov DKI memiliki kajian hukum sebelum menghapus aset ratusan bus. "Ini hal yang krusial dan harus segera kita tindaklanjuti karena masuk temuan BPK juga sehingga memerlukan kehati-hatian," jelas Andyka.

Sebelumnya, Dishub DKI telah mengusulkan penghapusan aset 417 unit bus Transjakarta kepada DPRD DKI Jakarta sejak 2018, dan hingga saat ini masih berproses. Kendalanya adalah pada kelengkapan data yang belum disodorkan, sehingga proses penghapusan aset masih belum bisa dieksekusi. ● **yan**



FOTO: ANTARA

### PENERTIBAN JARINGAN UTILITAS DI JAKARTA

Petugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta merapikan kabel utilitas yang telah dipotong di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (9/5). Penertiban jaringan utilitas berupa pemutusan kabel udara di kawasan Sudirman tersebut agar kota Jakarta dapat lebih indah dan tertata menjelang penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Jakarta pada bulan September mendatang.

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT SHELTON RESOURCES berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") tertanggal 5 Mei 2023 dan telah dinyatakan dalam akta tertanggal 8 Mei 2023 No. 4, dibuat dihadapan MYRA YUWONCO, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan untuk menurunkan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp. 10.932.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dan Modal Ditempatkan serta Modal Disetor Perseroan yang semula sebesar Rp. 3.383.000.000,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan atas penurunan modal ini dapat mengajukan keberatan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini, kepada:  
PT SHELTON RESOURCES  
di Jl Walter Monggadi No. 61C Blok Q/1,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan guna memenuhi ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Jakarta, 10 Mei 2023  
Direksi  
PT SHELTON RESOURCES

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEORAN TERBATAS (SIKULER) SEBAGAI PENGGANTIR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM "PT. ASA SATU KEWAJIBAN TEKNIK" No. 1, tanggal 05 Mei 2023, yang dibuat dihadapan ROSSY LUTRIANTY, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, Seluruh pemegang saham dengan suara telah memutuskan dan menyetujui:  
1. Melakukan Pembubaran (Likuidasi) terhadap Perseroan sebagaimana di atur dalam pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-undang Perseroan Terbatas;  
2. Menunjukan dan memberikan kewenangan kepada Direktur Utama Perseroan dan/atau Pihak lainnya yang memegang kuasa untuk menjalankan dan melaksanakan proses likuidasi terhadap Perseroan;  
Bagi para pihak yang berkepentingan atau memiliki tagihan dapat mengajukan likuidator secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengumuman ini disertai dokumen-dokumen asli dan lengkap ke alamat: Jl. MH. Thamrin, Plaza Amterdam Blok D2 Sentul City, Kel. Citarunggul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor  
Demikian Pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
Bogor, 9 Mei 2023